



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR: 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN DAN BENDAHARA
BARANG SKPD SEKRETARIAT DPRD, BADAN, DINAS
DAN KANTOR SE- KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Barang Daerah pada masing-masing SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Kantor Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf 'a';
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah
6. Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI No.4416) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 no.94,Tambahan Lembaran Negara RI No.4540)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. No.4503)
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.138,Tambahan Lembaran Negara RI no.4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI. No.4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.25, Tambahan Lemberan Negara RI No.4614)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor.89,tambahan Lembaran Negara RI No.4741)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staf ahli Bupati;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 18 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2016;

24. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang standarisasi barang dan harga kebutuhan pemerintah Kbaupaten Konawe utara tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

:
: Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara barang pada masing-masing SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor se- Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

KEDUA

: Bendahara-bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara barang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bendahara Pengeluaran:

- Mempersiapkan dokumen SPP (UP,GU,TU,LS gaji dan LS Belanja Modal, barang dan jasa) serta dokumen pendukungnya.
- Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian/Feripikasi.
- Menerima, membukukan, menjimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai dalam DPA-SKPD.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penggunaan uang (SPJ) disetiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan Tanggal 10 Bulan berikutnya.
- Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, Neraca , dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) SKPD.
- Membukukan setiap Penerimaan SP2D dari BUD, dan Pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dapat dalam DPA
- Membuat Register SPP , Register SPM dan Regiuster SP2D dari BUD.

2. Bendahara Penerimaan :

- Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti pembayaran/Bukti yang sah.
- Menyusun BKU Penerimaan, BKU Pembantu (Rician objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian).
- Membuat SPJ penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan daerah selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang penerimaan daerah pada rekening pribadi.
- Menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK, SKPD dan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

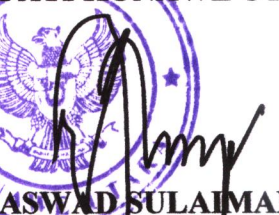
3. **Bendahara Barang :**

- Membuat jurnal penerimaan barang berdasarkan buku besar SKPD tertuang dalam neraca barang SKPD
- Membuat memorial transaksi asset tetap yang dibuat berdasarkan bukti transaksi terdiri dari :
 - Berita acara penerimaan barang
 - Berita acara pemeriksaan barang
 - Berita acara pemeriksaan pekerjaan
 - Berita acara pemusnahan barang
 - Mengarsipkan SK penghapusan barang dan mutasi barang
- Menyimpan bukti memorial transaksi asset dalam register jurnal umum.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan dan bendahara barang secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

 BUPATI KONawe UTARA, *ls*

 H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG
SKPD SEKRETARIAT DPRD, BADAN, DINAS, DAN KANTOR
SE- KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

No	NAMA SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA BARANG		BENDAHARA PENGELUARAN		ATASAN LANGSUNG
		NAMA/NIP/GOL.	3	NAMA/NIP/GOL.	4	NAMA/NIP/GOL.	5	
1	1 Sekretariat DPRD						6	
1				Menik 19810902 201408 1 002 II/a		Sarniati, S.Sos., M.Si 19710303 199103 2 010 III/d		Sekretaris DPRD
2	Bappeda			Sarman, SE 19730427 201101 1 003 III/c		Jumali, A.Md 19781027 2010001 1 007 II/d		Kepala Bappeda
3	Bacian Kepegawaian Daerah			Hasrun Malik 19850705 201212 1 003 III/c		Syamsu Alam, S.Ksi 19770430 200903 1 003 III/c		Kepala BKD dari Diklat
4	Bacian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			JUSLAN, S.Ip 19810201 200901 1 013 III/a		Miswatin, SE 19780614 200312 2 015 III/c		Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5	Bacian Lingkungan Hidup			Hasrat Arianto 19780401 201001 1 001 II/a		Hasbudi, ST 19831028 201001 1 028 III/b		Kepala Badan Lingkungan Hidup
6	Bacian Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan			Muh. Arief Masrin, SP 19780417 201001 1 012 III/c		Elis Tinobali, SP 19830719 200903 2 005 III/c		Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
7	Bacian Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan			Darmawan, SE 19740510 201408 1 003		Mahatmawati, S.Ip 19871224 201001 2 017		Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8	Bacian Kesbang, Politik, dan Linmas			Abdul Razak, SE 19780221 201001 1 010 III/c		Junaiddin 19830723 201412 1 001 II/a		Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas
9	Bacian Penanggulangan Bencana Alam			Yusran 19730613 200801 1 008		Arif Rahman, SE 19760614 20070 1 030		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam
10	Bacian Ketahanan Pangan			Firman 19851207 201408 1 001 Gol. II/a		Muliono, SP 19783001 201101 1 005 III/b		Kepala Badan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6
11	Badan Perizinan dan Penanaman Modal		Helmy 19781218 201212 2 003 II/a	Ashadi Cahyadi Togala 19780629 201001 1 011 II/a	Badan Perizinan & Penanaman Modal
12	Inspektorat Daerah		Septian, SE, MM 19871030 201101 1 008 III/b	Aswadi, S.Sos 19751113 200701 1 008 III/b	Kepala Inspektorat Daerah
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Toni Herblansyah Fiani 19880905 201101 1 004 Gol. II/d	Suparman, SE 19811208 200804 1 002 Gol. III/b	Kepala BPKAD
14	Dinas Pertambangan & Energi		Ambrila Rizki 19850619 201212 1 004 II/b	Rita T. A.Md 19780212 201001 2 016 II/d	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
15	Dinas Pendapatan Daerah	Herdin 19781001 201502 1 001 II/a	Nisbahuddin Zain 19660501 200604 1 002 III/a	Rima Arjuna Mekuo, S.Si, M.Ap 19741210 200903 2 005 III/b	Kepala Dispenda
16	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Hermawan, A.Md 19820321 200804 1 003 II/d	Sahrizal, A.Md 19850508 201001 1 026 II/d	Hasanuddin 19790505 201001 1 018 III/a	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	Dinas Sosial		Misnawati, S.Sos 19821020 201101 2 011 III/b	Kartika Pratiwi M, SE 19860512 201101 2 020 III/b	Kepala Dinas Sosial
18	Dinas TataKota, Pertamanan dan Kebersihan		Jerry, A.Md 19820819 200804 1 002 II/d	Mirwan, SE 19780810 201001 1 017 III/c	Kadis Tata Kota, Pertamanan & Kebersih
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Muhaimin Liambo, S.Pd 19740414 201408 1 001 II/a	Mulis, SE 19640119 199303 1 013 III/d	Kepala Dinas P & K
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Risanto, A.Md 19810127 201001 1 014 II/c	Sairun, A.Md 19751226 201001 1 007 II/d	Sabrina, S.Si 19890717 201101 2 011	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
21	Dinas Pertanian & Peternakan		Abd. Aman Ega, SP 19800831 201101 1 005 III/c	Sutono, SE 19760810 200903 1 001 III/a	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
22	Dinas Kependudukan & Capil		Alfian Mirdan, SE 19872212 201101 1 008 III/b	Iwan Budiono, SE 19860725 200903 1 002 III/c	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil
23	Dinas Kehutanan	Anton Saputra, S.Sos 19740615 200701 1 019 III/c	Syakrin, S.Hut 19720926 201001 1 007 III/b	Ajo 19710516 200701 1 022 II/b	Kepala Dinas Kehutanan
24	Kantor Korpri		Nakamuddin, S.Si 19631231 199008 1 005 III/c	Josnanudin, SE 19780918 200701 1009 III/c	Kepala Korpri
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		Arman, S.Sos. 19800419 201212 1 002 III/b	Suhamin 19721211 200701 1 022 II/c	Kepala Satpol
26	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rista Antias, S.Ip 19860806 201101 2 018 III/b	Ishar Ilyas 19740615 201408 1 002 II/a	Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

1	2	3	4	5	6
27	Dinas Perindagkop dan UMKM		Basrin, S.Si 19820219 201212 1 002	Nur Sri Julianti, A 19840727 201212 2 003	Kepala Dinas Perindag Koperasi dan UMKM
28	Dinas Kesehatan		Muh. Nur 19870227 201101 1 008 II/c	Harmin, SKM 19810603 201408 1 001 II/a	Kepala Dinas Kesehatan
29	Dinas Nakertrans		Sulastin, SE 19830825 201101 2 015 III/b	Taharuddin H, S.Sos 19731008 201001 1 005 III/b	Kepala Dinas Nakertrans
30	Dinas Perkebunan		Musharjo Muhammad 19840502 201411 1 001 II/a	Hasran, S.Sos 19810415 200701 1 011 III/c	Kepala Dinas Perkebunan
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anjas Laksana 19831227 201408 1 001 Gol. II/a	Muh. Subur, S.Pi 19740208 201101 1 001 Gol. III/b	Irawati Midwan, S.Si 1972032501001100 Gol. III/b	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
32	Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi		Mardawiah, S.Si 19740823 201212 2 001 III/a	Sarmin, S.Sos 19690218 199603 1 002 III/c	Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
33	Rumah Sakit Umum Daerah	Siti Ruhana, SKM 19750208 200903 2 004 III/b	Mulkia Dzikri, S.Farm, Apt 19891129 201402 2 001 III/b	Ako Arman, S.Sos 19840824 201101 1 012 III/b	Kepala/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
34	Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		Sofyan Samsari 19820527201408 1 001 II/a	Jibran 19800827 201408 1 002 II/a	Kepala Kantor Diklat
35	Dinas Pemuda dan Olahraga		Risal 19830505 2012 1 003 II/a	Halik, S.Pd 19601007 198610 1 003 III/c	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
36	Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Yohan 19790110 201408 1 001 II/a	Ridwan, S.Sos 19700909 201212 1 005 III/a	Kepala Kantor ULP
37	Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Produksi	Nila Sania Sabara, S.Hut,MM 1,98501E+17 III/a	Mulyadi, SE 19680210 200701 1 050 II/b	Hasbullah, T.S.Pd 19830913 201001 1 013 III/b	Kepala Kantor KPHP

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 4 Januari 2016

18

BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWAD SULAIMAN P.